

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau SPPD, merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk pegawai dalam melaksanakan tugas resmi di luar kantor. SPPD berfungsi sebagai bukti otentik tugas kedinasan seorang pegawai, serta sebagai dasar penyediaan dana untuk biaya perjalanan dinas. Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sistem informasi pengelolaan SPPD masih dilakukan secara konvensional, mulai dari pembuatan, pengarsipan, hingga pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Proses-proses tersebut sering menghabiskan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SPPD, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses terkait SPPD.

Selama melaksanakan kerja praktik, penulis menemukan beberapa masalah terkait dokumentasi dan pengelolaan surat perintah perjalanan dinas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Proses pengelolaan dan dokumentasi SPPD sendiri dilakukan secara konvensional, di mana setiap pembuatan SPPD dan pertanggungjawaban dana perjalanan dinas dicatat secara manual. Proses tersebut dilakukan oleh bagian keuangan melalui input data dan penyimpanan arsip fisik. Pengelolaan SPPD secara konvensional tersebut memiliki beberapa kendala, di antaranya : membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan, pencarian, dan pengarsipan SPPD, serta rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan dokumen. Dalam beberapa kasus di pengadilan tinggi tanjung karang, terdapat kendala dalam menemukan dan mengelola data surat perintah perjalanan dinas yang telah dibuat sebelumnya, serta adanya potensi kehilangan data akibat penyimpanan fisik. Dengan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk merancang dan membangun sistem informasi surat perintah perjalanan dinas berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan surat perintah perjalanan dinas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Adapun tingkat kesiapan teknologi dan sumber daya manusia yang akan menggunakan sistem ini dirasa cukup memadai, mengingat Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

Sistem informasi SPPD pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nantinya akan dirancang dan dibangun dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan surat perintah perjalanan dinas yang lebih baik. Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dalam manajemen SPPD diharapkan dapat secara signifikan mempermudah dan mempercepat seluruh proses terkait SPPD, mulai dari pengajuan, persetujuan, pembuatan, pengarsipan, hingga pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Sistem informasi SPPD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi kesalahan administratif, serta mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas proses pengelolaan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Jika dilihat dari prespektif terbalik penerapan sistem informasi SPPD di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang juga dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Untuk itu penerapan sistem ini masih akan di ujicoba terlebih dahulu pada jaringan lokal. Selain itu, biaya investasi yang cukup besar dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia dapat menjadi beban tambahan bagi pengadilan. Di sisi lain, adaptasi pegawai terhadap sistem baru juga dapat menjadi kendala, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan sistem manual. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi SPPD membutuhkan perencanaan matang, alokasi sumber daya yang memadai, dan edukasi bagi seluruh pengguna untuk memastikan transisi yang lancar.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP

Pada pelaksanaannya kegiatan kerja peraktek ini memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- a. Proses Analisis kebutuhan,
- b. Proses Perancangan Sistem, dan

c. Implementasi sistem informasi SPPD berbasis web

1.3 Manfaat dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya kegiatan kerja praktek ini tentu memiliki tujuan dan manfaat khusus, dalam hal ini penulis menekankan aspek manfaat dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Manfaat

Diharapkan dengan merancang dan membangun sistem surat perintah pembayaran perjalanan dinas pada pengadilan tinggi tanjung karang maka akan tercipta :

- a. Efisiensi Waktu dan Tenaga : Dengan otomatisasi yang diberikan oleh sistem ini, proses pembuatan dan pengelolaan SPPD menjadi jauh lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan manual.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas : Semua data dan laporan tersimpan dengan baik dalam sistem, memudahkan pelacakan dan audit kapan saja diperlukan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas.
- c. Keamanan Data : Dengan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, data pegawai dan perjalanan dinas lebih aman dan terjaga privasinya.
- d. Kemudahan Penggunaan : Dibangun menggunakan framework CodeIgniter, aplikasi ini menawarkan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh semua pengguna, baik administrator maupun user biasa.

1.3.2. Tujuan

- a. Merancang Sistem informasi SPPD pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
- b. Mengimplementasikan hasil rancangan Sistem informasi SPPD

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.4.1. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan dan implementasi aplikasi SPPD pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhitung selama satu bulan dari 30 Juli 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024.

1.4.2. Tempat Pelaksanaan

Perancangan dilakukan menyesuaikan SOP yang berlaku pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan implementasi perancangan berupa aplikasi berbasis website dilakukan pertama - tama melalui localhost sebagai upaya uji coba sistem.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat adalah sebagai berikut ini:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup kerja program KP, manfaat dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan dan sistematika penulisan

BAB II. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berisi sejarah Perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi.

Bab III. Permasalahan Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Berisi tentang permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, landasan teori pengertian tentang framework, codeigniter, rapid application development (RAD) dan Perancangan Berorientasi Objek (OOAD), Metode tentang analisis kebutuhan dan model rapid application development (RAD), serta Perancangan sistem dengan pendekatan objek oriented (OOAD) .

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Berisi pembahasan mengenai hasil implementasi rancangan.

BAB V. Kesimpulan Dan Saran

Berisi tentang kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan kerja praktek pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.